

**PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN DAERAH PINGGIR
KOTA DI KELURAHAN KAMELOH BARU KOTA PALANGKA RAYA**

**Farida
Immanuel Jaya
Suprayitno**

Abstract :

This study discusses the role of government in the development of suburban areas in Palangka Raya City. The aim is to describe how the Government's role in this case is the Kameloh Baru Village Government using the Tjokroamidjojo theory in which the Government is a motivator, facilitator and mobilizer in the implementation of development in the village.

This study uses qualitative research methods, the data collection techniques obtained through interviews, observation and documentation. Informants in this study included: Lurah (Head Of Village), Head of Section in Village, Village Employees, Head of neighbourhood, Head of hamlet, and the villager. Information from interviews is also equipped with news documentation and also observations in the field by researchers.

The results showed that the Kameloh Baru Village Head as a motivator had not run optimally. Because education and coaching efforts have not been able to increase community participation development in the Kameloh Baru area. The Lurah as a Facilitator, the Kameloh Baru Village Head has not been able to become a facilitator who provides solutions to problems that occur in the area. Lurah as a mobilizer, the coordination between the community and the government is still low. The relationship between the village government and the community is still not well. Obstacles to the Lurah in carrying out his role in development; As a mobilizer, there is still a lack of education provided to the community. So that public awareness is low in the development of the region's development. As a Facilitator, the deliberations between the government and the community have not been optimally carried out, the communication that occurs is still very minimal. As a mobilizer, the Lurah's coordination with the community has not been solidly established. Then the cooperation between the community and the relevant government has not been closely intertwined so that the Lurah's efforts in mobilizing have not been realized optimally.

Keywords : The Role Of Government, Development, Village

PENDAHULUAN

Setiap negara di dunia melaksanakan pembangunan dan berlomba-lomba membangun negaranya untuk meningkatkan kualitas dan daya saing. Secara umum pembangunan diartikan sebagai usaha mewujudkan kemajuan hidup berbangsa, yang menjadi suatu cita-cita bangsa. Pembangunan ini dilakukan dalam banyak sektor kehidupan, mencakup semua lini kehidupan manusia. Mulai dari pembangunan infrastruktur hingga pembangunan Sumber Daya Manusia. Dalam pelaksanaannya, negara maju menjadi kiblat bagi negara-negara lain untuk melakukan pembangunan di negaranya. Hal ini tentu karena negara maju memiliki perkembangan yang lebih pesat dan pembangunan yang unggul, didukung juga dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi.

Di Indonesia semangat pembangunan tertuang dalam Undang-Undang 1945, disebutkan bahwa tujuan Negara Republik Indonesia antara lain: yaitu, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dapat dilihat, pembangunan suatu negara erat kaitannya dengan usaha peningkatan kualitas hidup warga negara tersebut dan juga kualitas Sumber Daya Manusia-nya. Oleh karena itu, pembangunan dilaksanakan tidak hanya berfokus pada satu sektor yang sifatnya fisik tetapi juga sektor-sektor lainnya bersifat non-fisik.

Demi tercapainya tujuan pemerataan pembangunan di Indonesia, Pemerintah pusat memberikan otoritas kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan. Pemerintah daerah memiliki hak dan wewenang dalam melaksanakan pembangunan di wilayahnya seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah bahwa Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, diharapkan pemerintah daerah mampu menciptakan kebijakan atau program pembangunan yang sesuai dengan permasalahan pembangunan yang ada di wilayahnya masing-masing.

Bicara mengenai pembangunan infrastruktur dan kaitannya dengan peran pemerintah atau pemimpin, di Palangka Raya “kota Cantik” yang sempat direncanakan menjadi Ibukota Pemerintahan Indonesia ini, beberapa tahun terakhir menunjukkan banyak perubahan dalam segi infrastruktur. Meskipun demikian, pembangunan “kota Cantik” yang cukup pesat ini ternyata masih mengalami ketimpangan pembangunan. Walaupun pada pusat kota terlihat pembangunan infrastruktur yang memadai, ternyata masih terdapat beberapa wilayah yang memiliki masalah dengan akses jalan yang buruk. Di beberapa wilayah pinggir kota Palangka Raya, kondisi jalannya terdapat bagian aspal yang berlubang atau bahkan belum tersentuh aspal sama sekali. Juga beberapa kelurahan di kota Palangka Raya yang pembangunannya belum optimal, jauh tertinggal dari wilayah pusat kota. Pemerataan pembangunan masih menjadi “Pekerjaan Rumah” bagi pemerintah Kota Palangka Raya.

Salah satu daerah pinggir kota yang memiliki masalah pembangunan di Palangka Raya yaitu Kelurahan Kameloh Baru yang terletak di Kecamatan Sabangau. Letaknya tidak jauh dari lokasi Rumah Sakit Kota Palangka Raya yang berada di Kelurahan Kalamangan. Sebagai unit terkecil dalam lembaga pemerintahan yang mana termasuk dalam bagian kota Cantik Palangka Raya ini, Kameloh Baru terlihat sangat memprihatinkan. Pembangunan akses jalan serta sarana dan prasarana yang ada sangat perlu perhatian dari Pemerintah kota Palangka Raya. Akses jalan dari kota menuju desa di pinggir sungai terbilang buruk, bahkan ada bagian jalan yang hampir putus akibat banjir. Seperti yang terjadi pada tahun lalu, banjir melanda kawasan ini hingga setinggi 1 m (meter) dan membutuhkan waktu yang lama untuk surut. Kejadian ini, mengakibatkan kesulitan akses anak-anak untuk menuju ke sekolah, dan juga mengganggu aktivitas warga sekitar.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kelurahan

Kelurahan menurut Undang-Undang Nomor 73 Tahun 2005 Kelurahan merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan di wilayah

kecamatan. Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui Camat.

B. Peran

Kata peran bukanlah kata yang asing. Kata peran seringkali kita dengar atau temui di kehidupan kita sehari-hari. Jika dilihat dalam Kamus Bahasa Indonesia peran memiliki arti sebagai berikut :

- a. Peran adalah pemain yang diandaikan dalam sandiwara maka ia adalah pemain sandiwara atau pemain utama.
- b. Peran adalah bagian yang dimainkan oleh seorang pemain dalam sandiwara, ia berusaha bermain dengan baik dalam semua peran yang diberikan
- c. Peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.

Horoepotri, Arimbi dan Santosa (Gunena, 2013), mengemukakan bahwa peran terbagi menjadi beberapa dimensi yang sebagai berikut :

- a. Peran sebagai suatu kebijakan. Penganut paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik dilaksanakan
- b. Peran sebagai strategi. Penganut paham ini mendalikan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat (public support). Pendapat ini didasarkan pada suatu paham bahwa keputusan dan kepedulian masyarakat pada tiap tingkatan keputusan didokumentasikan dengan baik, maka keputusan tersebut memiliki kredibilitas.
- c. Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintah dirancang untuk melayani bernilai, guna mewujudkan keputusan yang responsif dan bertanggung jawab.
- d. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa. Peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi dan meredakan konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang

melandasi persepsi ini dalam bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan (mistrust) dan kerancuan (biasess).

- e. Peran sebagai terapi. Menurut persepsi ini, peran dilakukan sebagai upaya “mengobati” masalah masalah psikologis masyarakat seperti halnya perasaan ketidakberdayaan (sense of powerlessness), tidak percaya diri dan perasaan.

Peran yang menurut Tjokroamidjojo (Cuwendah, 2019) adalah sebagai :

- a. Motivator, Lurah sebagai pendorong dan pemberi semangat kepada masyarakat setempat, agar ikut melakukan tindakan-tindakan yang positif sehingga apa yang diharapkan dapat lebih berkembang dan suatu saat dapat menjadi penopang perekonomian yang ada.
- b. Fasilitator, Lurah sebagai fasilitator yaitu orang yang memberikan bantuan dan menjadi narasumber yang baik untuk berbagai permasalahan serta memfasilitasi kegiatan-kegiatan pembangunan dengan memberikan kemudahan dan kelancaran dalam proses pembangunan sehingga program pembangunan di wilayah kelurahan dapat berjalan baik
- c. Mobilisator, Orang yang mengarahkan atau menggerakkan untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan sebuah pembangunan guna untuk kepentingan bersama. Jadi Lurah sebagai mobilisator yakni menggerakkan atau mengajak masyarakat untuk bersama – sama melakukan tindakan yang nyata untuk membangun desa, misalnya melakukan gotong royong, memperbaiki tempat ibadah serta memperbaiki tempat – tempat umum lainnya.

C. Pembangunan

Listyaningsih dalam bukunya yang bertajuk *Administrasi Pembangunan* mengatakan;

“Pembangunan biasanya secara umum didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang

ditempuh oleh suatu negara dan bangsa menuju modernitas. Pembangunan juga diarahkan kepada perubahan paradigma atau mindset masyarakat dari tradisional menuju modern. Intinya bahwa pembangunan merupakan sebuah proses yang harus dilalui sebuah negara dalam rangka pencapaian tujuan negara yang bersangkutan”. (Listyaningsih, 2014)

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian tentang peran pemerintah dan tantangan pembangunan daerah pinggir kota di Kelurahan Kameloh Baru, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dimana penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu memberikan gambaran dan penjelasan yang tepat mengenai peran pemerintah dan tantangan pembangunan yang dihadapi, serta untuk memahami situasi secara mendalam di Kelurahan Kameloh Baru. Pendekatan ini lebih cocok karena dalam mendeskripsikan peran pemerintah tidak bisa hanya diwakilkan dengan angka-angka seperti yang disajikan dalam metode Kuantitatif. Oleh sebab itu, penulis memilih pendekatan Kualitatif yang bersifat mendeskripsikan masalah secara mendalam.

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dalam skripsi ini adalah:

- a. Observasi menurut Nasution dalam (Sugiyono, 2007) menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua Ilmu Pengathuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.
- b. Wawancara Semiterstruktur, jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori in-dept interview, di mana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan. (Sugiyono, 2007)

- c. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain. (Sugiyono, 2007)

Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification. (Sugiyono P. D., 2007).

HASIL PENELITIAN

1. Peran Lurah Sebagai Motivator dalam Pembangunan Infrastruktur

Pemerintah kelurahan dalam hal ini lurah memiliki peran sebagai motivator bagi masyarakat kelurahan. Lurah dapat memberikan motivator melalui pemberian pendidikan, pelatihan atau sosialisasi kepada masyarakat kelurahan terkait pembangunan infrastruktur. Lurah juga dapat memberikan motivasi berupa kesempatan yang diberikan untuk masyarakat menerima bimbingan atau pembinaan mengenai pembangunan infrastruktur. Serta Lurah memberikan dukungan moril atau materiil dalam program pembangunan jika memungkinkan.

Jadi berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis mengenai peran Lurah yang memberikan dukungan kepada masyarakat secara moril maupun materiil menunjukkan bahwa ada banyak keluhan masyarakat mengenai kebutuhan pembangunan di Kelurahan Kameloh Baru. Masyarakat menyampaikan secara aktif mengenai apa saja yang menjadi permintaannya dalam program pembangunan kepada Kelurahan. Namun, Lurah hanya bisa semaksimal mungkin memberikan dukungan dari keluhan masyarakat tersebut dengan cara menindaklanjuti keluhan tersebut ke tingkat pemerintahan selanjutnya. Karena adanya proses menentukan

skala prioritas pembangunan, sehingga aduan masyarakat dalam hal pembangunan tidak serta merta semuanya dapat terakumulasi. Lalu mengenai kendala dana Kelurahan yang terbatas juga sehingga program pembangunan hanya bisa terlaksana sedikit demi sedikit.

2. Peran Lurah Sebagai Fasilitator dalam Pembangunan Infrastruktur

Lurah sebagai fasilitator artinya Lurah memiliki peranan dalam menjembatani kebutuhan masyarakat kepada pemerintah ke tingkat selanjutnya. Lurah menjadi penyalur atau sambung tangan suara masyarakat kelurahan kepada pemerintah terkait. Di sini Lurah dapat memberikan fasilitas yang dibutuhkan masyarakat dalam program pembangunan kelurahan. Serta, Lurah juga menjadi fasilitator dalam mengatasi masalah-masalah yang terjadi di tengah masyarakat di kelurahan.

Jadi berdasarkan indikator sebagai fasilitator dalam peran Lurah Kameloh Baru membantu masyarakat menyelesaikan masalah yang ada sesuai dengan kondisi yang ada dan tingkat permasalahan. Namun juga bergantung pada keputusan Pemerintah Kota. Karena menyangkut ketersediaan dana anggaran yang ada setiap tahun. Jika masalah pembangunan yang terjadi itu kondisinya tidak memungkinkan untuk diatasi oleh Lurah maka harus menunggu respon dari Pemerintah Kota. Namun jika masalah dirasa bisa diselesaikan ditingkat Lurah maka Lurah akan membantu dengan menggunakan dana Kelurahan yang tersedia.

3. Peran Lurah Sebagai Mobilisator dalam Pembangunan Infrastruktur

Sebagai mobilisator, Lurah memiliki peran untuk dapat menggerakkan masyarakat dalam program pembangunan yang dilaksanakan. Namun, tidak hanya memberikan arahan kegiatan. Lurah diharapkan dapat hadir langsung dalam kegiatan program pembangunan bersama masyarakat kelurahan. Sebagai mobilisator Lurah berperan untuk mengkoordinir kegiatan pembangunan yang terlaksana, dari mulai perencanaan hingga evaluasi kegiatan pembangunan.

Jadi berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan melalui wawancara, indikator Lurah sebagai mobilisator belum dapat terlaksana dengan optimal. Hal ini telah coba diupayakan Lurah beserta perangkatnya, namun kondisi sosial dan masyarakat menjadi kendala. Tidak mudah menggerakkan masyarakat untuk ikut

serta berpartisipasi dalam setiap kegiatan pembangunan. Kesibukkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup menyita banyak waktu sehingga harapan menciptakan masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan itu sulit terwujud.

4. Kendala yang dialami dalam Menjalankan Peran Lurah

Dari tiga indikator yang ada dalam peran Lurah dalam pembangunan, masing-masing memiliki hambatan atau kendala untuk dapat dilaksanakan oleh Lurah beserta perangkatnya. Kendala ini bisa datang dari keadaan geografis yang ada di wilayah tersebut, dari kondisi Sumber Daya Manusia yang ada di wilayah tersebut, kondisi alam, keadaan sosial masyarakat, serta tentu anggaran dana kelurahan yang terbatas.

PEMBAHASAN

Dalam pembahasan ini akan dijawab rumusan masalah yang telah ditentukan pada bab sebelumnya mengenai bagaimana peran pemerintah kelurahan Kameloh Baru dalam pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan di wilayah tersebut, kemudian data dan informasi yang telah diperoleh dari hasil wawancara akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan teori. Seperti yang telah dijelaskan pada bab kedua, penelitian ini akan menjawab bagaimana peran pemerintah kelurahan dalam pembangunan infrastruktur dengan menggunakan 3 (tiga) indikator peran yang dikemukakan oleh Tjokroamidjojo.

Ketiga indikator ini digunakan untuk mengukur seberapa baik peran pemerintah yang terlaksana di Kameloh Baru selama ini. Ketiga indikator ini saling berkaitan satu dengan yang lain. Oleh karena itu, ketiganya harus berjalan dengan baik untuk mencapai pembangunan yang maju sesuai harapan. Namun, pada kenyataan yang didapatkan di lapangan ada banyak faktor juga yang berkaitan dengan peran-peran tersebut. Beberapa upaya dilaksanakan pemerintah untuk melakukan perannya dalam pembangunan. Tetapi, gerak pemerintah kelurahan

masih terbatas dan belum efektif sehingga pembangunan berjalan terhambat. Berikut ini untuk lebih lanjut melihat penjelasan setiap indikator;

a. Peran Lurah sebagai Motivator dalam Pembangunan

Pada peran Lurah sebagai motivator dalam pembangunan infrastruktur, setidaknya ada beberapa indikator yang dapat mengukur bagaimana peran Lurah sebagai motivator ini dapat dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah kelurahan (Cuwendah, 2019). Ketiga indikator tersebut yakni, Lurah memberikan pendidikan/sosialisasi kepada masyarakat terkait pembangunan infrastruktur, Lurah memberikan kesempatan untuk melakukan bimbingan/pembinaan terkait pembangunan infrastruktur, serta Lurah memberikan dukungan baik secara moril maupun materiil kepada masyarakat.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Lurah Kameloh Baru sebagai motivator mengacu pada indikator yang ada belum optimal dan belum berjalan sesuai. Perlu upaya Lurah beserta perangkatnya yang lebih besar dalam mengadakan beberapa kegiatan rutin yang bertujuan untuk membina masyarakat dalam bidang pembangunan. Bahkan tidak hanya di bidang pembangunan saja, Lurah juga perlu bekerja sama dengan pihak terkait untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat Kameloh Baru sesuai dengan dengan potensi wilayah dan kebutuhan masyarakat. Ini menjadi tugas dari Lurah beserta aparatnya agar terus berupaya memberikan dukungan dan melakukan langkah-langkah strategi untuk dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam turut serta di kegiatan pembangunan wilayah.

Menilik kembali dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, serta melihat kondisi di lapangan yang terjadi di Kameloh Baru sikap masyarakat sekitar yang tidak jarang acuh tak acuh terhadap kegiatan yang ada. Berhubung dengan kenyataan dilapangan demikian, usaha pemerintah kelurahan akan lebih maksimal jika diiringi dengan ide-ide kreatif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

Seperti yang tertuang dalam naskah Renstra (Rencana Strategis) Kecamatan Sabangau, bahwa salah satu permasalahan pada pembangunan di wilayah tersebut

yaitu partisipasi masyarakat yang masih minim dan masih lemahnya pengetahuan masyarakat tentang pengembangan pembangunan wilayah. Hal tersebut merupakan bukti bahwa peran yang dilaksanakan Lurah Kameloh Baru sebagai motivator menurut teori di atas belum berjalan optimal. Karena upaya-upaya pendidikan dan pembinaan belum dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan (fisik) di wilayah Kameloh Baru.

b. Peran Lurah sebagai Fasilitator dalam Pembangunan

Berikutnya yaitu peran Lurah sebagai fasilitator. Peran ini berkaitan dengan kemampuan Lurah untuk dapat berperan sebagai alat komunikasi masyarakat dengan pemerintah ke tingkat selanjutnya dalam menyampaikan aspirasi atau keluhan yang mereka alami di wilayah mereka. Seperti yang dikemukakan oleh Horoepoetri, dkk (Gunena, 2013) bahwa Peran adalah sebagai alat komunikasi yang artinya bahwa Lurah memiliki tugas untuk dapat menyampaikan informasi yang diperoleh dari masyarakat agar disampaikan ke Pemerintah dan pihak terkait untuk kemudian dapat ditindaklanjuti. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintah memang dirancang untuk melayani masyarakat dan memberikan keputusan yang responsif untuk masyarakat.

Dari hasil wawancara diperoleh informasi bahwa kemampuan Lurah perlu ditingkatkan dalam memberikan fasilitas kepada masyarakat dan juga berusaha sarana komunikasi keluhan masyarakat yang lebih baik. Lurah perlu membangun komunikasi yang lebih erat dengan masyarakat Kameloh Baru agar dapat terwujudnya peran sebagai fasilitator pembangunan di wilayah tersebut. Fakta di lapangan bahwa belum terbentuknya kedekatan antara masyarakat dengan Lurah dan perangkatnya. Sehingga aspirasi yang seharusnya dapat disampaikan belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Fakta ini di dukung oleh beberapa artikel yang menyatakan ada aspirasi-aspirasi yang disampaikan masyarakat belum dapat direalisasikan oleh Lurah dan perangkatnya. Salah satunya yaitu ada tahun 2019, masyarakat meminta pemerintah membangun jalan induk tersebut agar anak-anak mendapat akses yang baik untuk menuju ke sekolah dan juga meminta pemerintah mengadakan pelatihan untuk PKK serta melakukan renovasi untuk dua posyandu

yang sudah rusak (Priscilla, 2019). Namun hingga pertengahan tahun 2021, belum ada pembangunan yang terlihat di kelurahan Kameloh Baru.

Selain menjadi alat komunikasi, sebagai fasilitator pemerintah juga berperan sebagai alat penyelesaian sengketa atau masalah yang terjadi di tengah masyarakat. Horoepoetri, dkk (Gunena, 2013) mengatakan bahwa peran ini berguna sebagai suatu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah, mengurangi atau meredam konflik yang terjadi melalui usaha mengadakan pertemuan dan bermusyawarah mencari jalan keluar atas masalah yang terjadi. Sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Cucu Cuwendah dalam artikelnya (Cuwendah, 2019) bahwa indikator peran Lurah sebagai fasilitator adalah dengan Lurah memfasilitasi kebutuhan masyarakat terkait pembangunan di Kelurahan, Lurah mengatasi masalah-masalah yang terjadi dimasyarakat terkait pembangunan, Lurah menjadi fasilitator bagi masyarakat dengan pihak terkait ketika pelaksanaan program pembangunanra mengatasi masalah-masalah yang terjadi di masyarakat.

Jika dilihat dari fenomena-fenomena di lapangan, bahwa banyak masalah yang belum dapat di atasi oleh Lurah beserta perangkatnya kemudian didukung dengan artikel di atas menunjukkan bahwa peran lurah sebagai fasilitator masih jauh dari kata berhasil. Lurah Kameloh Baru belum mampu mengatasi permasalahan yang ada di lapangan dengan cara memfasilitasi keluhan masyarakat. Oleh karena itu, masih banyak aspirasi-aspirasi yang belum dapat direalisasikan. Sehingga strategi pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 yang salah satunya berfokus pada pembangunan daerah untuk mencapai pemerataan pembangunan. Fakta di lapangan belum terfasilitasi pembangunan sesuai rancangan yang ada terkait upaya meningkatkan insfrastruktur dasar di Kameloh Baru.

c. Peran Lurah sebagai Mobilisator dalam Pembangunan

Selanjutnya, peran Lurah yaitu sebagai mobilisator artinya Lurah menggerakkan atau mengajak masyarakat untuk bersama-sama melakukan tindakan yang nyata untuk membangun daerah. Mengutip pendapat Dwiyanto, dkk

(Dwiyanto, et al., 2017) bahwa pemerintah kelurahan sebagai pemerintahan terendah yang langsung berhadapan dengan publik merupakan tulang punggung implementasi kebijakan atau program pemerintah, peran Lurah sebagai mobilisator adalah bagaimana Lurah beserta perangkatnya dapat bekerja sama dengan masyarakat dalam melaksanakan kebijakan atau program yang telah ditentukan.

Dilihat dari keadaan di wikayah Kameloh Baru, bahwa masih rendahnya partisipasi masyarakat sekitar. Peran Lurah ini sebagai mobilisator perlu ditingkatkan lagi. Ada kerja sama yang lebih erat yang harus dibangun oleh Lurah untuk dapat melakukan upaya-upaya mobilisasi terhadap masyarakat dalam bidang pembangunan wilayah tersebut. Sehingga dapat berdampak pada proses pembangunan yang lebih baik.

Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No. 73 Tahun 2005 diuraikan bahwa Lurah mempunyai tugas salah satunya yaitu tugas Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang ada di Kelurahan. Tugas ini tentu saja dapat dilakukan Lurah beserta perangkatnya bekerja sama dengan masyarakat, mengajak masyarakat untuk sama-sama menjaga fasilitas yang ada agar dapat berfungsi dengan baik. Seperti yang dikemukakan (Cuwendah, 2019) Lurah menggerakkan masyarakat dalam program pembangunan, Lurah ikut serta dalam program pembangunan dilingkungan, Lurah mengkoordinir kegiatan pembangunan di lingkungan.

Dalam hal ini, Lurah hendaknya melakukan koordinasi dengan ketua RT setempat agar dapat mengajak masyarakat berperan aktif bergerak bersama menjaga dan memperbaiki fasilitas kelurahan Kameloh Baru yang ada. Ketua RT lah yang menjadi panjang tangan aparat kelurahan dalam mengajak masyarakat melakukan kegiatan pemeliharaan fasilitas yang ada. Lurah berupaya untuk dapat mengarahkan masyarakat, tetapi dalam pelaksanaannya tentu ada beberapa kendala yang dialami oleh Lurah. Sehingga peran ini tentu tidak mudah dilaksanakan dan belum terlaksana secara optimal.

Dengan keterbatasan yang ada dan kondisi masyarakat Kameloh Baru, peran Lurah sebagai mobilisator ini menjadi tugas yang cukup berat bagi Lurah beserta perangkatnya. Seperti yang diungkapkan oleh Arsjad bahwa jika di sebuah wilayah

pedesaan, pemerintah desa memiliki peran signifikan dalam pengelolaan proses sosial didalam masyarakat. Tugas utama yang harus diemban pemerintah desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokratis, memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga dapat membawa warganya pada kehidupan yang sejahtera, rasa tentram dan berkeadilan. (Arsjad, 2018). Dalam hal ini, pemerintah Kelurahan harus mampu membangun rasa percaya antara pemerintah dengan masyarakat agar hubungan Lurah dengan masyarakat dapat berjalan lebih baik dan berdampak positif dengan peran Lurah sebagai Mobilisator pembangunan. Sehingga tujuan pembangunan dalam berjalan sesuai dengan yang tertulis pada Rencana Pembangunan daerah tersebut.

d. Kendala yang dialami dalam Pelaksanaan Peran

Dari informasi yang diperoleh melalui wawancara, ada berbagai hal yang menjadi kendala Lurah dalam melaksanakan ketiga perannya dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan Kameloh Baru. Seperti yang telah diketahui, 3 (tiga) indikator ini yang digunakan untuk mengukur keberhasilan peran Kelurahan dalam melaksanakan pembangunan di wilayahnya. Indikator-indikator tersebut diharapkan dapat dilaksanakan pemerintah Kelurahan dengan baik, karena jika salah satu saja dari indikator tersebut tidak berjalan sesuai harapan, maka pelaksanaan peran Lurah tersebut tidak menghasilkan program-program pembangunan yang baik pula.

Melihat kondisi-kondisi di lapangan, beberapa upaya sudah dilakukan oleh Pemerintah Kelurahan Kameloh Baru. Namun, jika dilihat dari kondisi pembangunan di wilayah tersebut masih jauh dari kata berhasil. Adanya hambatan di sana-sini pembangunannya, sehingga membuat upaya pelaksanaan peran pemerintah Kameloh Baru melemah. Permasalahan yang ditanggung pemerintah Kameloh Baru terbilang cukup serius dan dengan kekurangan-kekurangan yang ada membuat daerah ini semakin tertinggal.

Kemampuan pemerintah Kameloh Baru dalam melaksanakan ketiga peran tersebut tidak sebanding dengan permasalahan pembangunan yang terjadi di wilayahnya. Seperti yang terjadi juga pada penelitian sebelumnya yang dilakukan

oleh Cucu Cuwendah, yaitu permasalahan kewenangan dalam program-program pembangunan yang bergantung pada dinas-dinas terkait, sehingga peran kelurahan belum dapat optimal dan secara penuh. Hal ini juga yang terjadi di wilayah Kameloh Baru. Kemudian ditambah lagi dengan permasalahan anggaran yang tentu saja terjadi tidak hanya di Kameloh Baru, ini merupakan hambatan yang dirasakan oleh banyak pemerintah daerah.

Berikut ini hambatan-hambatan atau kendala yang terjadi dalam pelaksanaan peran pemerintah Kameloh Baru;

1. Sebagai motivator, pada idealnya peran sebagai motivator yaitu Lurah memberikan pendidikan/sosialisasi kepada masyarakat terkait pembangunan infrastruktur. Juga kesempatan untuk mendapat pendidikan. Namun, pada kenyataannya masih minimnya pendidikan yang diberikan terhadap masyarakat. Sehingga rendah kesadaran masyarakat dalam pengembangan pembangunan wilayah tersebut.
2. Sebagai fasilitator, peran ini berkaitan dengan kemampuan Lurah untuk dapat berperan sebagai alat komunikasi masyarakat dengan pemerintah ke tingkat selanjutnya dalam menyampaikan aspirasi atau keluhan yang mereka alami di wilayah mereka. Dengan fakta dilapangan musyawarah yang dilakukan antara pemerintah dan masyarakat belum optimal dilakukan, komunikasi yang terjadi masih sangat minim.
3. Sebagai mobilisator, pemerintah kelurahan sebagai pemerintahan terendah yang langsung berhadapan dengan publik merupakan tulang punggung implementasi kebijakan atau program pemerintah (Dwiyanto, et al., 2017), Lurah sebagai mobilisator adalah bagaimana Lurah beserta perangkatnya dapat bekerja sama dengan masyarakat dalam melaksanakan kebijakan atau program yang telah ditentukan. koordinasi Lurah dengan masyarakat belum terbangun secara solid. Kerja sama antara masyarakat dengan pemerintah terkait belum terjalin erat sehingga upaya Lurah dalam mobilisasi belum terwujud optimal.

KESIMPULAN

1. Berdasarkan dengan 3 (tiga) indikator peran Lurah dalam pembangunan yakni, motivator, fasilitator dan mobilisator dapat disimpulkan bahwa:
 - a. Lurah sebagai Motivator, Lurah Kameloh Baru sebagai motivator menurut teori di atas belum berjalan optimal. Karena upaya-upaya pendidikan dan pembinaan belum dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan (fisik) di wilayah Kameloh Baru.
 - b. Lurah sebagai Fasilitator, Lurah Kameloh Baru belum mampu menjadi fasilitator yang memberikan jalan keluar bagi masalah-masalah yang terjadi di wilayah tersebut. Upaya dan kemampuan komunikasi perlu ditingkatkan agar Lurah dan perangkatnya dapat memfasilitasi keluhan masyarakat.
 - c. Lurah sebagai Mobilisator, koordinasi masyarakat dengan pemerintah masih rendah. Hubungan kerja sama pemerintah Kelurahan dengan masyarakat masih belum terbentuk dengan baik. Sehingga peran mobilisator yaitu untuk menggerakkan dan koordinasi dengan masyarakat masih rendah.
2. Hambatan Lurah dalam melaksanakan perannya dalam pembangunan;
 - a. Sebagai Motivator, masih minimnya pendidikan yang diberikan terhadap masyarakat. Sehingga rendah kesadaran masyarakat dalam pengembangan pembangunan wilayah tersebut.
 - b. Sebagai Fasilitator, musyawarah yang dilakukan antara pemerintah dan masyarakat belum optimal dilakukan, komunikasi yang dilakukan untuk penyampaian masalah-masalah dan aspirasi yang terjadi masih sangat minim.
 - c. Sebagai Mobilisator, koordinasi Lurah dengan masyarakat belum terbangun secara solid dan aktif. Kemudian kerja sama antara masyarakat dengan pemerintah terkait belum terjalin erat sehingga upaya Lurah dalam mobilisasi belum terwujud optimal.

DAFTAR PUSTAKA

SUMBER BUKU :

- Digdowiseiso, K. (2019). *Teori Pembangunan*. Jakarta Selatan: LPU-UNAS.
- Dwiyanto, A., Partini, Ratminto, Wicaksono, B., Tamtiari, W., Kusumasari, B., & Nuh, M. (2017). *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Listyaningsih. (2014). *Administrasi Pembangunan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono, P. D. (2007). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA, cv.

SUMBER JURNAL :

- Arsjad, M. F. (2018). *Peranan Aparat Desa dalam Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa di Desa Karyamukti Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo*. *Public Administration Studies*, 16-32.
- Cuwendah, C. (2019). *Peranan Lurah Dalam Melaksanakan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Situbatu Kecamatan Banjar Kota Banjar*. *Moderat*, 422-430.
- Gunena, N. (2013). *Peran Lurah Dalam Pembangunan Infrastruktur di Kelurahan Kolongan Mitung Kecamatan Tahuna Barat Kabupaten Sangihe*. 90.
- Heningtyas, M. A., Sjamsuddin, S., & Hadi, M. (2014). *Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam Upaya Pengembangan Pendidikan Nonformal*. *Jurnal Administrasi Publik*, 264-268.
- Kamirudin. (2014). *Analisis Program Pembangunan Infrastruktur di Desa Gobah Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar*. Pekanbaru: UIN SUSKA RIAU.
- Nurcholis, H., Kartono, D. T., & Aisyah, S. (2016). *Pembangunan Masyarakat Desa dan Kota*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.

SUMBER WEBSITE :

Friana, H. (2018, Desember 18). *Tirto*. Retrieved from Tirto.id:
tirto.id/korupsi-di-proyek-waskita-kementerian-bumn-pengawasan-tak-optimal-dceR

Priscilla, T. (2019, januari 29). *Borneo News*. Retrieved from Borneonews.co.id:
<http://www.borneonews.co.id>

Ramadhan, A. (2020, Oktober 21). *Kompas*. Retrieved from Kompas.com:
<http://nasional.kompas.com/read/2020/10/21/11442191/kasus-korupsi-proyek-infrastruktur-eks-anggota-dprd-kota-banjar-dipanggil>

SUMBER LAIN :

Naskah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024

Naskah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023

Naskah Rencana Strategis Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023

Naskah Rencana Strategis Kecamatan Sabangau Tahun 2018-2023

Naskah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Naskah Undang-Undang Nomor 73 Tahun 2005